

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Australia memiliki lokasi geografis yang strategis, yang menjadi faktor utama dalam terjalinnya hubungan antara kedua negara. Hubungan diplomatik resmi dimulai dengan berdiri Kedutaan Besar Indonesia di Yarralumla, Canberra, di 1971. Selanjutnya, di 2005, kedua negara menandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* untuk memperkuat kerja sama, yang diselenggarakan setelah bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Sebagai bagian dari dukungan pemulihan, Australia memberikan bantuan senilai 45 miliar rupiah (Kedutaan Besar Indonesia di Australia, 2009).

Sejarah hubungan Indonesia dan Australia dimulai dengan baik. Salah satu bukti kehangatan hubungan ini adalah dukungan Australia terhadap perjuangan Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan di periode 1945–1949. Selain pemerintah Australia, rakyat Australia, terkhusus kelompok buruh, turut memberikan bantuan. Para buruh memboikot 559 kapal dagang dan kapal perang Belanda yang berupaya mengembalikan pemerintahan kolonial di Indonesia dan menggalang dana untuk mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Dukungan moral yang diberikan oleh sikap ini kepada Indonesia sangat besar.

Australia secara konsisten mengecam dua agresi militer Belanda terhadap Indonesia dan mengambil inisiatif untuk menyampaikan masalah Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Australia berupaya menginternasionalisasi isu ini agar mendapatkan perhatian dunia. Sikap Australia ini mendorong para pemimpin Indonesia untuk memilih Australia menjadi salah satu anggota dalam *Komisi Jasa-Jasa Baik*, yang kemudian dikenal sebagai *Komisi Tiga Negara (KTN)*. Dalam KTN, Australia mewakili kepentingan Indonesia bersama Amerika Serikat dan Belgia untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda.

Komisi ini memainkan peran penting dalam mengawasi berbagai perundingan, termasuk perundingan di atas kapal Renville hingga Konferensi Meja Bundar. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil ketika Belanda secara resmi

mengakui kedaulatan Indonesia di 27 Desember 1949 di Den Haag. Australia juga termasuk negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baik secara *de facto* di Juli 1947 ataupun *de jure* di Desember 1949. Selain itu, Australia menjadi salah satu sponsor utama dalam pengajuan Indonesia sebagai anggota PBB pada tahun 1950.

Perbatasan maritim terpanjang di dunia dimiliki oleh Indonesia dan Australia, dua negara tetangga. Australia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia selama lebih dari 7 dekade, dimulai dengan bantuannya selama kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, hubungan bilateral yang stabil tidak serta merta merupakan hasil dari kedekatan geografis dan peran Australia di masa-masa awal kemerdekaan. Pada perjalanannya, hubungan kedua negara mengalami dinamika yang fluktuatif, kadang terjalin dengan baik, namun di waktu lain mengalami penurunan tajam.

Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kepekaan pembuat kebijakan Australia terhadap isu-isu sensitif di Indonesia, liputan media yang berlebihan, dan perbedaan budaya. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Australia telah mengalami pasang surut, sejumlah besar pengamat berpendapat bahwa kedua negara memiliki visi dan proses berpikir yang sama dalam berbagai bidang. Indonesia dan Australia terus berupaya untuk memperkuat dan menyesuaikan hubungan bilateral mereka dalam menanggapi perkembangan regional dan global.

Kesepakatan seperti *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) dan *Lombok Treaty* (2006) diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat guna memperkuat kerja sama serta mengesampingkan isu yang berpotensi mengganggu hubungan. Namun, kenyataannya, hubungan kedua negara masih menghadapi berbagai tantangan di beberapa kesempatan.

2+2 Dialogue merupakan salah satu mekanisme utama dalam hubungan Indonesia-Australia, selain *Annual Leaders' Meeting* (ALM) serta *Indonesia-Australia Dialogue* (IAD). Mekanisme ini dikembangkan sejak 2011 dan pertama kali diselenggarakan di Canberra pada 2012. Forum ini mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara guna membahas berbagai isu strategis, baik di tingkat bilateral, regional, ataupun global. Selain itu, dialog ini

juga menjadi sarana memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan di kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Australia semakin erat. Interaksi antara pejabat pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum terus meningkat. Salah satu indikasi dari kedekatan ini adalah perubahan dalam tradisi diplomatik Australia—jika sebelumnya Perdana Menteri yang baru dilantik biasanya memilih London atau Washington sebagai tujuan kunjungan pertama, kini Indonesia menjadi prioritas utama.

Momentum penguatan hubungan ini juga terlihat dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia pada 2017 serta kunjungan Perdana Menteri Scott Morrison ke Indonesia pada Agustus 2018. *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) berakhir selama kunjungan tersebut, yang menandai tonggak penting dalam kemitraan ekonomi antara kedua negara. Memang, kedua pemimpin mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat *Comprehensive Strategic Partnership*, dengan demikian menggambarkan dedikasi yang lebih mendalam terhadap berbagai upaya kerja sama. Pidato Presiden Joko Widodo kepada parlemen Australia pada bulan Februari 2020 menjadi bukti keakraban yang semakin erat antara Indonesia dan Australia. Kedua negara berada di kawasan yang sedang berkembang pesat, yang mengharuskan penyesuaian dan penilaian kebijakan luar negeri masing-masing.

Dinamika regional yang terus berubah dapat memiliki dampak yang beragam terhadap hubungan bilateral. Di satu sisi, tantangan kawasan berpotensi menjadi faktor yang mengganggu stabilitas hubungan Indonesia-Australia. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat menjadi pemicu bagi kedua negara agar semakin memperkuat kerja sama guna menghadapi berbagai tantangan bersama.

Diaspora dapat dipahami sebagai individu yang tinggal di luar negeri, baik untuk sementara ataupun dalam jangka waktu yang panjang, dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Di Indonesia, istilah “diaspora” mencakup warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri, serta individu keturunan Indonesia yang bukan warga negara Indonesia (WNI) tetapi memiliki nenek moyang atau keturunan dari Indonesia.

Konsep diaspora Indonesia tidak membedakan profesi, status hukum, latar belakang etnis, maupun asal-usul suku. Selain itu, diaspora mencakup berbagai kategori, termasuk mereka yang memegang paspor Indonesia, individu keturunan Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing, orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, hingga individu yang tidak memiliki hubungan darah atau kewarganegaraan Indonesia tetapi tetap memiliki kepedulian dan keterikatan dengan budaya atau masyarakat Indonesia.

Diaspora merujuk pada individu yang bermigrasi ke luar negeri karena berbagai alasan. Pertama, faktor politik, seperti konflik di negara asal yang mendorong mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Kedua, faktor ekonomi, di mana mereka berperan dalam investasi dan ekspor dari negara asal ke negara tujuan. Ketiga, faktor sosial dan budaya, yang melibatkan tekanan sosial atau budaya yang mendorong seseorang untuk pindah ke luar negeri (Kalra, S. V., & lainnya, 2005).

Diaspora Indonesia telah tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Australia, dan berperan sebagai jembatan dalam bidang budaya serta ekonomi di negara tempat mereka tinggal. Mereka menjadi penghubung yang efektif antara Indonesia dan Australia karena pemahaman mereka yang mendalam tentang budaya, bahasa, jaringan yang luas, dan sistem pemerintahan negara tersebut. Selain itu, diaspora Indonesia berkontribusi terhadap pasar internasional dengan memahami kebutuhan konsumen di Australia, sehingga meningkatkan ekspor produk Indonesia. Diaspora Indonesia juga dapat memperkenalkan peluang investasi di Indonesia kepada investor asing melalui koneksi mereka yang luas (Syafitri Freesca, Andayani Putri, Emayanti, 2023).

Di era globalisasi, negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung dan menjalin kerja sama dalam perdagangan internasional. Konektivitas global yang terus berkembang mendorong masyarakat Indonesia untuk memperluas hubungan kerja sama hingga menetap di luar negeri, yang kemudian dikenal sebagai diaspora. Individu yang bermigrasi ke negara lain karena berbagai alasan, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya, disebut diaspora (Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005).

Ada dua golongan utama dalam diaspora Indonesia. Individu yang lahir di Indonesia dan memiliki keturunan Indonesia termasuk dalam kategori awal. Kelompok kedua mencakup mereka yang, meskipun tidak memiliki paspor Indonesia, tetap memiliki ikatan budaya dan jiwa kebangsaan Indonesia. Sekarang ini, banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan telah memperoleh kewarganegaraan negara lain, tetapi tetap mempertahankan budaya, semangat, dan identitas sebagai bagian dari diaspora Indonesia.

Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia, yang dikenal sebagai IA-CEPA, didasarkan pada prinsip kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan. Kemitraan ini dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara dalam jangka panjang. Perjanjian IA-CEPA ditandatangani pada tahun 2019 dan mulai diterapkan pada tahun 2020 (Free Trade Agreement Center, 2020).

Diaspora Indonesia di Australia didorong oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) untuk memanfaatkan implementasi IA-CEPA yang telah diimplementasikan pada 5 Juli 2020. IA-CEPA akan menghasilkan pengurangan bea masuk untuk sejumlah produk Indonesia, dalam beberapa kasus menjadi nol persen. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk tersebut di pasar Australia. “Oleh karena itu, pelaku bisnis di kedua negara diharapkan dapat merespons dan mengambil langkah konkret untuk memanfaatkan skema IA-CEPA ini,” ujar Direktur Jenderal PEN, Kasan. Implementasi IA-CEPA juga diharapkan dapat mendorong kerja sama antara diaspora Indonesia di Australia dan pelaku usaha di Indonesia, sehingga memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Siaran Pers, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

Diaspora Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perdagangan internasional, khususnya melalui foreign direct investment (FDI), selain peran mereka sebagai mitra bisnis dan fasilitator perdagangan. FDI didefinisikan sebagai penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Di undang-undang, PMA diartikan menjadi kegiatan penanaman modal dalam bentuk moneter atau non moneter lainnya dalam aset yang dimiliki oleh orang asing dalam bentuk pribadi dan badan usaha. Warga negara Indonesia

yang tinggal di luar negeri memiliki sumber daya yang berharga, pengetahuan pasar lokal, serta jaringan dan hubungan yang luas. Diaspora Indonesia dapat memperkenalkan peluang investasi di Indonesia kepada investor asing, memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan, serta membantu perluasan akses pasar untuk produk dan layanan Indonesia dengan memanfaatkan koneksi dan jaringan bisnis mereka. Selain itu, diaspora Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber modal yang signifikan dan berkontribusi pada peningkatan citra merek Indonesia di mata investor asing. Diaspora Indonesia berfungsi sebagai duta ekonomi dengan identitas nasional yang kuat dan rasa bangga terhadap Indonesia, sehingga mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Ada banyak metode yang dapat digunakan diaspora Indonesia untuk berkontribusi pada FDI. Bergantung pada karakteristik diaspora dan koneksi yang mereka miliki, kontribusi mereka dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan dapat sangat bervariasi.

Diaspora Indonesia harus berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diaspora untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi perdagangan internasional. Langkah-langkah seperti pembentukan forum bisnis diaspora, penyediaan informasi dan dukungan bagi pengusaha Indonesia yang ingin berbisnis di luar negeri, dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bisnis diaspora dapat berkontribusi pada pengembangan kemampuan perdagangan internasional Indonesia. Signifikansi diaspora Indonesia dalam perdagangan internasional tidak dapat disangkal. Indonesia dapat meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia, meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi asing, dan memperluas akses pasar dengan memanfaatkan potensi dan kontribusinya.

Penelitian ini berfokus pada hubungan Indonesia dan Australia yang mempunyai latar belakang sejarah dan kepentingan strategis, sehingga studi mengenai kerja sama bilateral dan peran diaspora menjadi sangat relevan. Sejak pendirian Kedutaan Besar Indonesia di Australia pada tahun 1971 dan deklarasi kemitraan komprehensif pada tahun 2005, hubungan kedua negara terus berkembang, terutama dalam aspek ekonomi dan budaya.

Diaspora Indonesia di Australia berperan sebagai penghubung budaya dan ekonomi, dengan wawasan mendalam mengenai budaya, bahasa, serta jaringan yang luas, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Selain itu, ratifikasi IA-CEPA diharapkan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk akses pasar yang lebih luas serta peningkatan investasi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana diaspora dapat memanfaatkan perjanjian tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1971, yang didasari oleh kedekatan geografis dan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu bentuk kerjasama yang sangat signifikan adalah melalui bidang perdagangan dan ekonomi, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diaspora Indonesia di Australia berfungsi bukan hanya sebagai perwakilan budaya, tetapi juga sebagai jembatan ekonomi antara kedua negara. Dengan populasi Indonesia yang cukup besar di Australia, diaspora ini memiliki potensi untuk berkontribusi kepada ekonomi Indonesia melalui investasi, remitan, dan perdagangan. Mereka dapat memanfaatkan jaringan sosial dan profesional yang telah dibangun di Australia untuk membuka pintu peluang bagi produk dan jasa dari Indonesia. Diaspora berperan aktif dalam memperkenalkan produk lokal Indonesia ke pasar Australia, serta menciptakan koneksi yang menguntungkan antara pelaku usaha di kedua negara.

IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) merupakan sebuah perjanjian komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2020, yang bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga kerjasama dalam bidang pendidikan dan teknis. Salah satu inti dari IA-CEPA adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan, menghilangkan tarif, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi kedua negara.

IA-CEPA diharapkan dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia, sehingga membuka berbagai peluang bagi diaspora Indonesia di Australia untuk berinvestasi dan menjalankan usaha. Dengan perjanjian ini, pelaku bisnis diaspora dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengakses pasar Australia yang lebih luas, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih kuat dengan rekan-rekan di Indonesia. Diaspora juga dapat berkontribusi dalam menciptakan hubungan perdagangan yang lebih baik dan mendukung pengembangan sektor ekonomi di Indonesia secara keseluruhan.

Meski IA-CEPA memberi peluang baru, diaspora Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam memanfaatkan perjanjian ini sepenuhnya. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya informasi yang memadai tentang regulasi dan prosedur bisnis di Australia. Diaspora sering kali kesulitan dalam memahami kerangka hukum yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam beroperasi secara efektif.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan jaringan bisnis yang dapat menghambat kolaborasi. Diaspora yang tidak memiliki koneksi yang kuat di pasar Australia mungkin merasa terisolasi dan kesulitan untuk menemukan mitra bisnis yang bisa dipercaya. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa juga sering menjadi hambatan dalam komunikasi dan negosiasi, membuat interaksi antara pelaku bisnis menjadi tidak efisien.

Kompleksitas regulasi di kedua negara juga menjadi tantangan signifikan. Banyak diaspora yang merasa kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembentukan usaha dan akses ke pembiayaan. Di samping itu, kurangnya dukungan pemerintah, baik dari Indonesia maupun Australia, untuk membantu diaspora memahami dan memanfaatkan kesempatan yang ada, menjadi faktor penting yang perlu dicermati.

Penulis, menulis penelitian ini untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh diaspora Indonesia dalam memanfaatkan IA-CEPA. Dengan mempertimbangkan kendala yang mereka hadapi serta peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai

bagaimana diaspora dapat beradaptasi dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif.

Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keterlibatan diaspora dalam perdagangan internasional. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia dan Australia untuk meningkatkan dukungan kepada diaspora dalam bentuk program pelatihan, akses informasi, dan pembangunan jaringan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi kedua negara, dengan memanfaatkan potensi diaspora sebagai penghubung dan penggerak ekonomi yang aktif. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, serta mendukung diaspora melalui kebijakan yang tepat, diharapkan kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia dan Australia dapat meningkat, memperkuat hubungan bilateral dan menciptakan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Aspek kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa kontribusi baru terhadap pemahaman hubungan bilateral Indonesia-Australia serta peran diaspora dalam kerja sama ekonomi. Pertama, penelitian ini secara mendalam menganalisis dampak implementasi IA-CEPA dengan fokus pada bagaimana diaspora Indonesia dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia. Kedua, penelitian ini menyoroti peran diaspora sebagai jembatan budaya dan ekonomi, yang masih jarang dieksplorasi dalam konteks hubungan kedua negara, sehingga memberikan perspektif baru mengenai potensi komunitas diaspora dalam memperkuat kerja sama bilateral.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Potensi bisnis diaspora Indonesia melalui Program IA-CEPA 2020-2023 mungkin menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya informasi mengenai peluang bisnis dan regulasi yang berlaku di Australia, terbatasnya jaringan yang dapat menghambat kolaborasi, serta perbedaan budaya dan bahasa yang menyulitkan komunikasi. Selain itu, kompleksitas regulasi di kedua negara, kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, dan kurangnya dukungan

pemerintah turut menjadi tantangan. Diaspora juga harus bersaing di pasar yang ketat dan mungkin perlu meningkatkan keterampilan relevan untuk sukses dalam bisnis. Mengatasi isu-isu ini melalui program pelatihan, pembentukan jaringan, dan dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan potensi bisnis mereka. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menyimpulkan secara keseluruhan mengenai tantangan yang mungkin dihadapi oleh para diaspora.

1.2.2 Masalah Pokok

Diaspora Indonesia dapat mengidentifikasi potensi bisnis dalam berbagai sektor, seperti teknologi, makanan dan minuman, serta layanan pendidikan, yang menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Untuk berpartisipasi dalam IA-CEPA, diaspora dapat mengambil langkah konkret seperti berkolaborasi dengan perusahaan lokal, berpartisipasi dalam pameran dagang, dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti masalah regulasi yang kompleks, perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi bisnis, serta keterbatasan akses informasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

Diaspora Indonesia harus terlibat dalam bisnis melalui IA-CEPA karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi, remitan, dan perdagangan, yang semuanya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. IA-CEPA menawarkan kerangka kerja yang mendukung keterlibatan bisnis dengan akses pasar yang lebih baik dan pengurangan hambatan perdagangan, sehingga penting bagi diaspora untuk memanfaatkan kebijakan ini guna meningkatkan daya saing mereka. Selain itu, diaspora sering memiliki jaringan yang kuat di negara tempat mereka tinggal, yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bisnis di kedua negara, memperkenalkan produk, serta menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Persepsi diaspora Indonesia terhadap peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA serta dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, untuk memahami sejauh mana mereka dapat memanfaatkan perjanjian tersebut. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi penggunaan jaringan

yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia dalam mendukung bisnis yang berfokus pada ekspor produk Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh diaspora dalam memanfaatkan IA-CEPA untuk pengembangan usaha, seperti regulasi yang kompleks, perbedaan budaya, dan keterbatasan akses informasi, juga perlu diidentifikasi dan dianalisis. Terakhir, dukungan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap inisiatif bisnis diaspora melalui IA-CEPA menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha diaspora, sehingga evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan tersebut mendukung partisipasi mereka sangat diperlukan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Pertanyaan Pokok Penelitian

1. Bagaimana dampak dari IA-CEPA terhadap kedua negara khususnya terhadap diaspora Indonesia di Australia?

1.3.2 Pertanyaan Operasional

1. Bagaimana pemanfaatan diaspora Indonesia terhadap peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh diaspora Indonesia dalam memanfaatkan IA-CEPA untuk pengembangan usaha?
3. Sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia mendukung inisiatif bisnis diaspora melalui IA-CEPA?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi peluang bisnis yang berpotensi tinggi bagi diaspora Indonesia di pasar Australia melalui IA-CEPA, serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkan perjanjian tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung inisiatif bisnis diaspora, serta mengeksplorasi model bisnis dan praktik terbaik dalam pemasaran yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak ekonomi dari aktivitas bisnis diaspora terhadap perekonomian lokal di Australia dan Indonesia, mendorong kolaborasi antara diaspora, pemerintah, dan sektor swasta, serta mengumpulkan data tentang perilaku

konsumen dan preferensi pasar Australia terkait produk Indonesia. Dengan itu, penelitian ini dimaksudkan memberi kontribusi signifikan pada pengembangan bisnis diaspora Indonesia di Australia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan tentang peluang bisnis yang tersedia bagi diaspora serta strategi dan model bisnis yang efektif untuk pasar Australia. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan dukungan dan kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat IA-CEPA. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi diaspora, penelitian ini juga dapat membantu merancang program pelatihan dan dukungan yang lebih baik, sehingga meningkatkan keterampilan dan kemampuan berbisnis mereka. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan potensi kontribusi diaspora terhadap perekonomian lokal di Australia dan Indonesia, serta mendorong kolaborasi antara diaspora, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan bisnis. Terakhir, penelitian ini menghasilkan data relevan tentang preferensi konsumen dan dinamika pasar Australia, yang dapat dipergunakan pelaku bisnis guna mengambil keputusan yang lebih baik.

